

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori ekonomi pembangunan merupakan grand theory dalam penelitian ini. Di dalam teori ekonomi pembangunan dijelaskan tentang perkembangan teori tersebut dari masa ke masa, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, baik kesehatan, pendidikan maupun ekonominya. Perkembangan alat ukur pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dipengaruhi oleh inflasi, Penanaman Modal Dalam Negeri, upah minimum dan tenaga kerja. Pada penelitian ini, teori-teori yang mendasari adalah sebagai berikut:

2.1.1. Manajemen

Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia "*maneggiare*" yang berarti "mengendalikan", terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti "tangan". Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *management*, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur" (Sarinah, 2017).

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2019). Sedangkan menurut Sarinah (2017) manajemen adalah Suatu Proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Menurut Muliana et al (2020) manajemen merupakan aktivitas dalam menjalankan pekerjaan berkaitan dengan organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan. Sedangkan menurut Nurdiansyah et al (2019), mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian aktivitas yang terdiri

dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Naim et al (2019), manajemen adalah kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan membuat rencana, mengorganisasikan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Adanya pengendalian bertujuan untuk mengawasi kinerja karyawan di dalam organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan mengenai manajemen, peneliti menggunakan penelitian dari Sucahyowati & Hari (2017), yang menjelaskan manajemen adalah rangkaian kegiatan berkaitan dengan perencanaan, kepegawaian, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan menggerakkan seluruh sumber daya organisasi.

Menurut Schermerhorn (2017) dalam Foster et al (2019) proses manajemen dimulai dari membentuk visi dan misi yang berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi. Setelah terbentuk visi dan misi langkah selanjutnya adalah menyusun strategi untuk menentukan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi. Setelah menyusun strategi langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi, yaitu mengimplementasikan strategi yang telah disusun secara rinci dengan mengalokasikan sumber daya organisasi.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional, dengan hal ini dapat dikatakan bahwa suatu perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi

barang dan jasanya meningkat (Kato et al., 2021). Berikut ini faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, antara lain:

- a) Sumber daya alam yang tersedia
- b) Modal untuk pengelolaan sumber daya alam yang tersedia
- c) Sarana dan prasarana yang menunjang

Menurut Djojohadikusumo dalam Kato et al (2021) pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini berkaitan dengan output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi, kenaikan output perkapita harus dianalisis dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain, pertumbuhan ekonomi mencakup GDP total dan pertumbuhan penduduk (Wardini, 2020).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk melakukan penghitungan pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang tersebut terdapat pada produk domestik bruto (PDB) (Siagian et al., 2020).

2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) yang memiliki arti sebagai besarnya nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB)

memiliki sedikit perbedaan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto (PDB) diperuntukkan untuk menghitung pendapatan nasional, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDR) diperuntukkan untuk skala daerah, sehingga PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Keduanya menjadi indikator utama dalam menilai produktif suatu negara dan daerah serta kesejahteraan dalam suatu negara atau daerah (Kato et al., 2021).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB pada dasarnya merupakan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung setiap tahunnya (Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 27 Tahun 2018)

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB memiliki manfaat sangat banyak dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Beberapa manfaatnya antara lain sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, kemakmuran, kenaikan dan penurunan daya beli masyarakat, tingkat inflasi dan deflasi, menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi, tetapi juga menggambarkan perekonomian dimasa lalu dan kemungkinan-kemungkinan prediksi perubahan dimasa yang akan datang (Ali & Muta (2019).

- 1) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran didapatkan dari nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha yang sidatnya tidak mencari

keuntungan, surplus usaha (bunga neto, sewa tanah, dan keuntungan) tidak diperhitungkan.

2) Pendekatan Pendapatan

PDB dan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksudkan adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

2.1.3. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dan persediannya, yaitu permintaan melebihi persediaan dan semakin besar perbedaan itu semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi bagi kesehatan ekonomi (Soesastro, 2005).

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya (Bank Indonesia). Hamilton dalam Simanungkalit (2020) menyatakan bahwa inflasi telah banyak digambarkan sebagai situasi ekonomi saat peningkatan pasokan uang lebih cepat daripada produksi barang dan jasa dalam perekonomian yang sama. Tingkat inflasi diukur sebagai persentase perubahan indeks harga (indeks harga konsumen, indeks harga grosir, indeks harga produsen, dan lain-lain).

Essien dalam Simanungkalit (2020) berpendapat bahwa indeks harga konsumen (IHK) mengukur harga keranjang perwakilan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen rata-rata dan dihitung atas dasar survei periodik harga konsumen. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Teori-Teori Inflasi sebagai berikut:

1. Teori Kuantitas

Menurut Sukirno (2002), Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, kaum klasik berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh

jumlah uang yang beredar. Harga akan naik jika ada penambahan uang yang beredar. Jika jumlah barang yang ditawarkan tetap, sedangkan jumlah uang ditambah menjadi dua kali lipat, maka cepat atau lambat harga akan naik menjadi dua kali lipat.

2. Teori Keynes

Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena nafsu berlebihan dari suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia (Sukirno, 2002). Karena keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan, permintaan bertambah, sedangkan penawaran tetap, yang akan terjadi adalah harga akan naik, pemerintah dapat membeli barang dan jasa dengan cara mencetak uang, misalnya inflasi juga dapat terjadi karena keberhasilan pengusaha memperoleh kredit. Kredit yang diperoleh ini digunakan untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan agregat meningkat, sedangkan penawaran agregat tetap. Kondisi ini berakibat pada kenaikan harga-harga.

3. Teori Struktural

Teori ini menyorot penyebab inflasi dari segi struktural ekonomi yang kaku Sukirno (2002). Produsen tidak dapat mengantisipasi cepat kenaikan permintaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk. Permintaan sulit dipenuhi ketika ada kenaikan jumlah penduduk.

2.1.4. Penanaman Modal Dalam Negeri

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan definisi modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha dalam negeri menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2007 adalah kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri (Syahputri, 2017).

Menurut Nuraini (2017), Penanaman Modal Dalam Negeri atau disingkat (PMDN) merupakan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap penanam modal dalam negeri dengan memakai modal dalam Negeri.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri menyebutkan bahwa PMDN adalah penggunaan kekayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha.

Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Penanaman Modal Dalam Negeri Langsung (Domestic Direct Investment atau DDI) yaitu penanaman modal oleh pemiliknya sendiri.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri Tidak Langsung (Domestic Indirect Investment atau DII) yaitu melalui pembelian obligasiobligasi, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Mampu menghemat devisa.
- b) Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing.
- c) Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang.
- d) Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

Bukan suatu hal yang mudah dalam melakukan kegiatan menanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investor juga harus memperhatikan kondisi ekonomi di suatu wilayah tersebut.

Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri yakni sebagai berikut:

- 1) Potensi dan karakteristik suatu daerah.
- 2) Budaya masyarakat.
- 3) Pemanfaatan era otonomi daerah secara proporsional.
- 4) Peta politik daerah dan nasional.
- 5) Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

Sebelum melakukan kegiatan menanam modal khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Permodalan Merupakan kekayaan masyarakat Indonesia (pasal 1 ayat 1 UU No.6 Tahun 1968) baik langsung maupun tidak langsung.

- b. Pelaku Investasi Negara dan swasta, pihak swasta dapat terdiri dari orang dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia.
- c. Bidang Usaha Semua bidang yang terbuka bagi swasta, yang dibina, dipelopori atau dirintis oleh pemerintah.
- d. Perizinan dan Perpajakan Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Antara lain izin usaha, lokasi, pertanahan, perairan, eksplorasi, hak-hak khusus, dan lain-lain.
- e. Batas Waktu Berusaha Merujuk kepada peraturan dan kebijakan masing-masing daerah.
- f. Tenaga Kerja Wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan tertentu belum dapat diisi dengan tenaga kerja 23 bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan merupakan hak dari karyawan (Syahputri, 2017).

2.1.5. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Menurut Saefurrahman et al., (2020) Tenaga kerja adalah mereka yang dipekerjakan dalam proses produksi yang tidak hanya dipandang sebagai factor produksi melainkan dipandang juga sebagai khalifah yang dihargai dengan upah yang disepakati secara ikhlas oleh kedua belah pihak dengan tanggung jawab dan amanah untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Tenaga Kerja ialah merupakan segala usaha dan juga ikhtiar yang dilakukan anggota tubuh atau pikiran untuk memperoleh imbalan yang sepentasnya.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1997, tenaga kerja adalah Setiap orang laki-laki atau perempuan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi menurut undang-undang ini yang

digolongkan sebagai tenaga kerja mencakup mereka yang sedang bekerja, belum bekerja dan dalam atau sedang mengurus rumah tangga.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang termasuk angkatan kerja dan sudah bekerja guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Lestiyasari, 2017). Tenaga kerja terdiri dari 2 kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (Nuraulian, 2017). Sedangkan bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang kegiatannya sekolah (pelajar dan mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (Jayanti 2019).

Menurut Sumarsono bahwa pengertian angkatan kerja (labour force) adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Adapun pengertian angkatan kerja dalam hal ini “mampu” berarti mampu secara fisik, jasmani, kemampuan mental dan juga secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan juga melakukan pekerjaan yang dilakukan serta bersedia secara aktif maupun juga pasif dalam melakukan dan mencari pekerjaan.

Secara umum, pengertian angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang secara aktif melakukan suatu kegiatan ekonomi. Labour Force atau Angkatan Kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang pada dasarnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam suatu kegiatan produksi barang dan jasa. Angkatan kerja merupakan penduduk yang dalam setiap kegiatan utamanya dalam seminggu yang lalu bekerja (K) dan penduduk yang sedang dalam mencari pekerjaan (MP). Adanya pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh dua faktor yakni struktur umur penduduk dan juga adanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang terdapat dalam suatu negara atau daerah di suatu waktu tertentu berkaitan dengan jumlah penduduk usia kerja yang dibandingkan dengan angkatan kerja dan penduduk yang berada dalam usia kerja yang biasa disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Secara tidak langsung jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan

kerja yang tersedia. Semakin besar lapangan kerja yang tersedia maka akan semakin banyak angkatan kerja yang terserap. Dengan terserapnya angkatan kerja maka total produksi di suatu daerah akan meningkat (Jayanti 2019).

2.1.6. Upah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1) Tahun 2015), Upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa disuatu perusahaan (Soedarjadi, 2008; Syaiful, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lebih lanjut dalam PP Nomor 78 Tahun 2015, kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan sebagaimana dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 antara lain:

a. Upah minimum

Pengertian upah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum adalah, upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini wajib dijadikan acuan oleh pengusaha dan pelaku industri sebagai standar minimum dalam memberi upah pekerjanya. Setiap daerah memiliki standar kebutuhan hidup layak yang tidak sama,

sehingga berpengaruh pada penetapan upah pekerja. Karena itu, upah minimum tidak berlaku secara nasional, melainkan untuk wilayah tertentu yang meliputi provinsi dan kota/kabupaten, atau juga disebut Upah Minimum Regional (UMR) (Cahyaningtyas, 2019)

- a. Upah kerja lembur
- b. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- c. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- d. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- e. Bentuk dan cara pembayaran upah
- f. Denda dan potongan upah
- g. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- h. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- i. Upah untuk pembayaran pesangon
- j. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Simanungkalit (2020) dengan judul “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PMDN, PMA, Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Jambi dan untuk menganalisis pengaruh PMDN, PMA, Ekspor dan Impor terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi. Model analisis yang digunakan adalah Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek PMDN berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan impor berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahunnya maka

pemerintah harus berperan penting dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi yang memiliki potensi-potensi yang ada sehingga pendapatan masyarakat tinggi yang juga mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ardiansyah (2017) dengan judul “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan turun dan sebaliknya jika inflasi turun maka pertumbuhan ekonomi akan naik.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Umayanti & Made (2019) dengan judul “Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah Dan Penanaman Modal Terhadap PDRB Di Provinsi Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Bali; (2) pengaruh tingkat upah terhadap PDRB di Provinsi Bali; dan (3) pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap PDRB di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data yang sudah diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), serta data PDRB Provinsi Bali persektor. Data-data tersebut merupakan data tahunan yang dirilis setiap tahun dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sementara itu, untuk data penanaman modal diperoleh dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) Provinsi Bali. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple regression dan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Jumlah tenaga kerja, tingkat upah dan PMDN secara serempak berpengaruh positif terhadap PDRB di Provinsi Bali; (2) Tenaga kerja, tingkat upah dan PMDN secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Bali.

Yunita & Sentosa (2019) adalah penelitian keempat dengan judul “Pengaruh Pajak, Penanaman Modal Dalam Negeri (Pmdn) Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial antara pajak, investasi (PMDN) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data time series berupa data tahunan dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2017, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian, secara simultan pajak, investasi (PMDN) dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1987 sampai dengan tahun 2017. Secara parsial variabel pajak berpengaruh positif signifikan, investasi (PMDN) berpengaruh positif signifikan, tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1987 sampai dengan 2017. Untuk kedepannya disarankan kepada para pengambil kebijakan terutama pemerintah harus memaksimalkan perolehan pajak nasional sebagai sumber biaya pembangunan. Meningkatkan nilai investasi di Indonesia dengan jalan memberikan jaminan keamanan yang lebih baik kepada investor, mempermudah proses perizinan dan menjaga agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan kondusif. Selain itu peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja juga sangat diperlukan mengingat persaingan yang semakin mengglobal dan sebagai upaya menarik pihak ketiga untuk datang ke daerah yang memiliki sumber daya yang memiliki kemampuan yang tinggi.

Penelitian kelima dilakukan oleh Patriamurti & Septiani (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Pma, Pmdn, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar - 3,665910. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar 0,245317. Tenaga Kerja (TK) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien sebesar 163,7923. Secara simultan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 - 2018.

Penelitian keenam dilakukan oleh Ningsih et al (2020) dengan judul “Pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PMDN, PMA, Ekspor, Impor dan Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Jambi dan untuk menganalisis pengaruh PMDN, PMA, Ekspor dan Impor terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi. Model analisis yang digunakan adalah Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek PMDN berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan impor berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahunnya maka pemerintah harus berperan penting dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi yang memiliki potensi-potensi yang ada sehingga pendapatan masyarakat tinggi yang juga mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Lutfi & Jamiah (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”. Penelitian bertujuan untuk memutuskan dampak dari upah minimum provinsi dan nilai tukar petani terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Jambi berdasarkan informasi 2011-2020. Pemeriksaan ini merupakan riset kuantitatif mengingat informasi yang disiapkan adalah informasi kuantitatif seperti informasi umum tentang upah terendah yang diizinkan undang-undang (UMP) dan skala tukar-menukar petani (NTP) serta perkembangan keuangan

(pertumbuhan ekonomi). Sumber informasi yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai informasi opsional yang kemudian diteliti menggunakan berbagai regresi linier berganda dan faktor otonomnya adalah UMP dan NTP sedangkan variabel dependennya adalah Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini membuktikan Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Meliani et al., (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2019. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Pengumpulan data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2009-2019. Datanya akan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda melalui Uji F dan uji T dengan asumsi klasik. Hasil dari studi menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Simanungkalit (2020) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ardiansyah (2017) juga menyatakan hal yang sama yakni adanya pengaruh antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik atau berlawanan, yaitu jika inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun dan jika inflasi menurun maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

2.3.2. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi yang merupakan bagian cukup penting untuk mempercepat perkembangan perekonomian suatu negara atau daerah. Investasi sendiri di Indonesia memiliki investasi yang di jalankan pemerintah dan juga ada investasi yang di miliki oleh pihak swasta. Investasi pemerintah berasal dari tabungan pemerintah serta yang berasal dari bantuan luar negeri. Sementara

investasi swasta ini di bedakan antara investasi asing yang sering disebut Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penelitian Patriamurti & Septiani (2020) menyatakan bahwa PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Meliani et al., (2021) menyatakan PMDN berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ningsih et al (2020) juga menyatakan hal serupa yakni PMDN berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.3. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

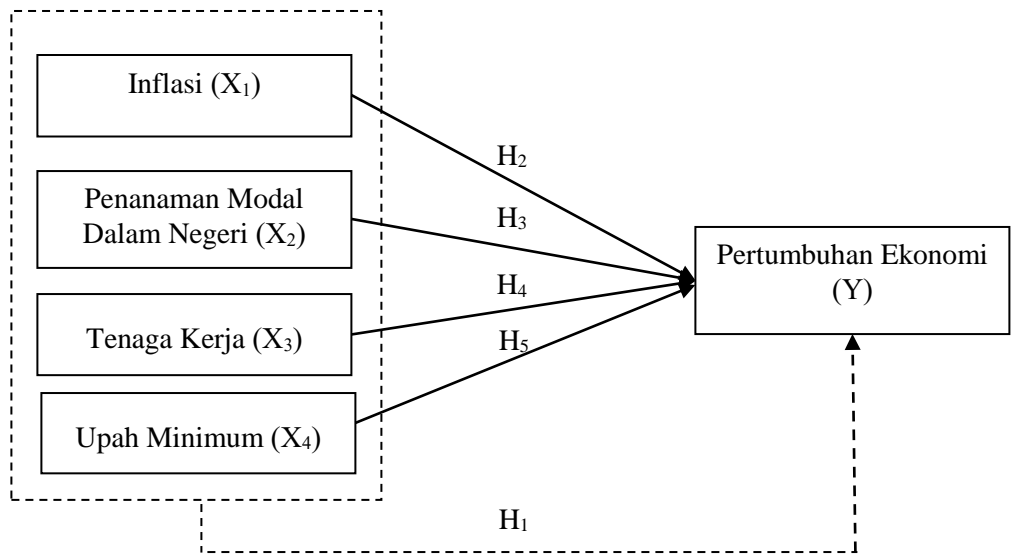
Suatu daerah yang memiliki penduduk dengan jumlah yang besar terutama penduduk pada usia produktif, maka jumlah tenaga kerja akan mengalami peningkatan sehingga tingkat produksi output barang ataupun jasa di suatu daerah akan ikut serta mengalami peningkatan. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang tinggi dapat mendorong suatu daerah dalam meningkatkan produktivitasnya. Penelitian Patriamurti & Septiani (2020) menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

2.3.4. Pengaruh Upah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Utami (2018) membuktikan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Lutfi & Jamiah (2021) membuktikan secara parsial upah minimum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian Aryanta & Gusti (2022) menyatakan upah minimum secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.4. Model Penelitian

Model analisis pada penelitian ini dapat dimodelkan pada persamaan berikut ini:



Gambar 2.1 Model Analisis

2.5. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya menurut Sugiyono (2016). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ = Inflasi, Penanaman Modal Dalam Negeri, tenaga kerja dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₂ = Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₃ = Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₄ = Tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- H₅ = Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Halaman ini sengaja dikosongkan